

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sudah mulai masuk Revolusi Industri 4.0, terlihat dari banyaknya instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses-akses informasi internal, pengawasan karyawan, dan pembukuan. Untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang masih tergolong baru ini, diperlukan persiapan khusus yang mendukung terutama bagi para aktor pemerintahan, web developer, atau pemilik blog. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti pemanfaatan komputer dan internet untuk kebutuhan standar era kekinian.

Sudah sewajarnya pemerintah tersebut mengikuti perkembangan dunia teknologi sehingga menjadi pemerintahan yang modern dengan tujuan dalam melayani masyarakat dan dunia bisnis dapat tercapai. Akan tetapi karena kompleksitas organisasi pemerintah, mengingat banyak pihak yang terkait, maka diperlukan suatu sistem yang kompleks dan terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan fungsi seluruh komponen pendukung organisasi pemerintahan.

Kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi terjadi begitu pesat. Hal tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat dimanfaatkan

oleh banyak pihak untuk mencapai keunggulan melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan.

Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan daerah mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang biasa dikenal dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien, efektif dan transparan. Namun demikian, sistem informasi berbasis komputer bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya sistem informasi berbasis komputer, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, mendaftarkan secara online untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah kapanpun dan dimanapun. Penerapan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah ASN dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Setiap ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan tersebut dituntut untuk memiliki kinerja yang baik.

Di sisi lain, dengan diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi daerah, agar setiap daerah untuk berupaya meningkatkan citra dan kualitas penyelenggaraan pemerintahannya dengan memanfaatkan segala upaya yang tersedia. Salah satunya dengan menerapkan sistem informasi berbasis komputer guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi.

Dalam menyikapi dinamika penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, khususnya mendukung pencapaian target pembangunan 2018-2023 maka penggunaan sistem informasi di pemerintahan sangat diperlukan, salah satunya yaitu penggunaan komputer untuk menunjang kinerja pegawai.

Dengan adanya penerapan sistem informasi berbasis komputer di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdapat pergeseran budaya kerja pemerintah menjadi lebih modern identik dengan penggunaan komputer pada proses kerja, dokumentasi pendataan yang dilakukan secara elektronik. Sebelum ada penerapan sistem informasi berbasis komputer pekerjaan kurang efektif dan efisien. Pengolahan data dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat apabila didukung dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada praktiknya setiap dinas diharuskan memberikan penilaian terhadap setiap pegawainya. Penilaian kinerja memberikan dampak perubahan yang lebih baik. Kinerja yang dinilai merupakan gambaran konkret dari prestasi pegawai. Ketika pegawai diberikan penilaian, secara tidak langsung semangat dan motivasinya akan terpacu, mengingat penilaian kinerja menjadi rapor bagi setiap aparatur. Penilaian juga membuka ruang inovasi dan kreativitas bagi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berasumsi bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu penting karena dengan teknologi akan mempermudah setiap ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, ASN dapat dengan mudah

melaporkan setiap tugas hariannya kapanpun dan dimanapun. Atasan juga dapat mengontrol bawahannya dengan mudah tanpa harus mendatangnya satu persatu.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat salah satu OPD di Jawa Barat yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pemerintahan. Dengan adanya komputer pegawai mampu mengerjakan semua pekerjaan dengan efektif dan efisien. Contohnya dalam pengisian peer review, Dinas Kehutanan sudah memanfaatkan teknologi komputer dalam menilai pegawainya yaitu melalui peer review. Peer review ini dilakukan dua kali dalam sebulan, pengisian peer review ini dilakukan oleh pegawai untuk menilai rekan kerjanya. Selain itu, dalam hal pelaporan setiap pekerjaan harian pegawainya pun sudah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SKP yang sudah disediakan oleh pemerintahan. Jumlah pegawai di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebanyak 85 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang terbagi kedalam 5 unit kerja sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	1
	1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	20
	2) Sub Bagian Keuangan dan Aset	17
	3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9
3.	Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat (BUPM)	10
4.	Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan (P2KH)	10
5.	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS)	8

6.	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (PKSDAE)	9
Total		85

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Semua pegawai yang berada di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mampu mengoperasikan komputer sebagai penunjang dalam melaporkan setiap pekerjaannya.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti mengenai penggunaan sistem informasi berbasis komputer, berdampak pada capaian SKP saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Hasil Rekapitulasi Nilai Prestasi Kerja Pegawai Di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun	Nilai Prestasi Kerja
1	2018	91,06
2.	2019	93,84

Sumber: SKP online 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa kinerja pegawainya menunjukkan nilai diatas 90 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Pasal 17 Tahun 2011 tentang Unsur-Unsur Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), berikut daftar kategori penilaiannya:

Tabel 1. 3
Unsur-Unsur Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kriteria Nilai	Keterangan
91 – 100	Sangat Baik
76 – 90	Baik
61 – 75	Cukup
51 – 60	Kurang
50 ke bawah	Sangat Kurang

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011

Data diatas menunjukkan bahwa hasil nilai kinerja pegawai di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan pada tahun 2018 dan 2019, ada beberapa pegawai yang mengalami perubahan nilai. Dari 85 orang pegawai masih terdapat beberapa pegawai yang mengalami perubahan terutama dalam penurunan nilai, terdapat sebanyak 12% dari total pegawai yang terdapat di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Perubahan nilai yang terjadi pada pegawai ini diakibatkan karena kurang mampunya pegawai dalam memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer, salah satunya penggunaan SKP online. SKP online ini digunakan oleh pegawai di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu media pelaporan aktivitas harian pegawai yang akan berdampak pada nilai kinerja pegawai setiap bulannya.

Hal ini disebabkan karena kesalahan pegawai dalam melaporkan setiap tugas hariannya melalui SKP sehingga tidak memenuhi waktu minimum selama 300 menit per hari. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pegawai adalah sering terjadi kesalahan dalam pengisian aktivitas harian yang tidak memperhatikan template waktunya.

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema sistem informasi berbasis komputer, untuk mengukur seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi berbasis komputer di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sistem Informasi Berbasis Komputer Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang ditemukan peneliti diantaranya:

1. Masih terdapat 12% PNS yang mengalami penurunan nilai kinerja dari sangat baik menjadi baik.
2. Masih terdapat 12% PNS yang melakukan kesalahan dalam pengisian laporan harian.
3. Masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenai pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer.
4. Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam pengisian SKP.
5. Masih terdapat beberapa pegawai yang tidak memperhatikan templet waktu setiap kegiatannya.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Berbasis Komputer di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Berbasis Komputer terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi berbasis komputer di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi berbasis komputer terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian memiliki kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan teori dan untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang. Selain itu diharapkan mampu memberikan telaah terhadap teori sistem informasi dan kinerja pegawai sehingga menjadi masukan bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan teori tersebut.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap peningkatan kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Barat. Serta penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan penulis dalam mencapai gelar sarjana.

2) Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan program, khususnya pada penggunaan sistem informasi yang menjadi fasilitas dalam menilai kinerja pegawainya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Siagian dalam buku Ilmu Administrasi Negara (Anggara, 2012: 21) mendefinisikan administrasi sebagai berikut: “Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Chandler & Plano dalam (Pasolong, 2013: 7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Hartono (2013: 20) dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi yang digunakan dalam manajemen.

Memperjelas pelaksanaan suatu Sistem Informasi Berbasis Komputer peneliti akan mengemukakan dimensi-dimensi yaitu sudut pandang dari sebuah Sistem Informasi Manajemen yang mengutip dari Kenneth C. Laudon & Jane

P. Laudon (Hartono, 2013: 22) dalam bukunya menyebutkan ada empat dimensi dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu (1) dimensi keahlian, (2) dimensi organisasi, (3) dimensi manajemen dan (4) dimensi teknologi.

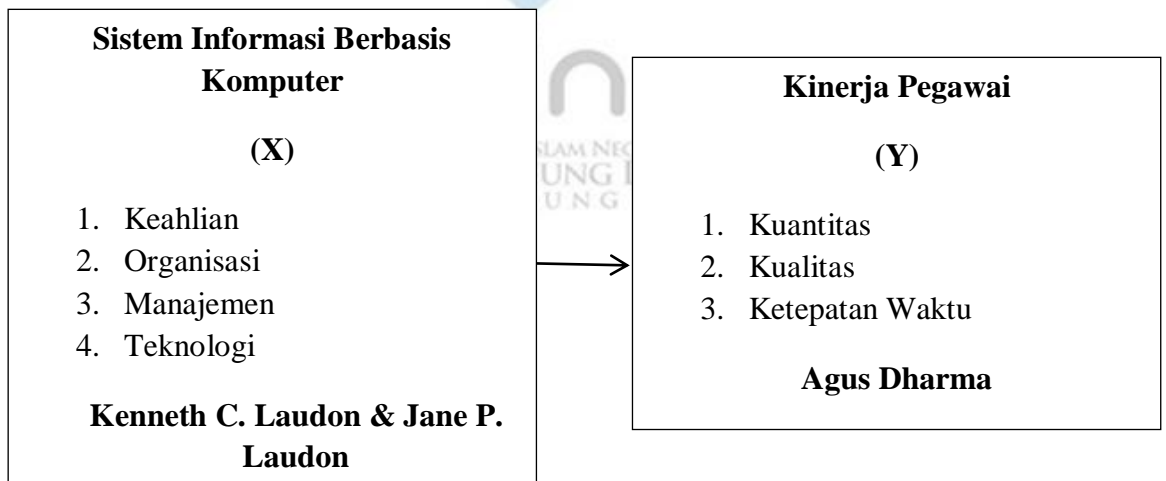
Lebih jelas mengenai hal tersebut diatas peneliti akan menguraikan secara lengkap, sebagai berikut :

1. Dimensi keahlian. Dapat dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan sebuah sistem informasi manajemen dibutuhkan dua bidang keahlian, yaitu keahlian sistem informasi dan keahlian teknologi.
2. Dimensi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat mempengaruhi unsur-unsur kunci organisasi.
3. Dimensi manajemen. Kinerja sistem informasi manajemen dapat diukur dengan seberapa besar penggunaan keluarannya yaitu informasi oleh dan untuk kepentingan manajemen.
4. Dimensi teknologi. Teknologi berkisar pada uraian mengenai teknologi manajemen data serta teknologi telekomunikasi dan jaringan. Teknologi manajemen data mencakup pengorganisasian data atau pangkalan data atau yang biasa disebut database. Sedangkan teknologi telekomunikasi dan jaringan itu mencakup perangkat keras dan perangkat lunak.

Berkaitan dengan kinerja Mangkunegara (Pasolong, 2013: 197) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Penilaian atas kinerja ini harus dilakukan, karena penilaian ini dapat menjadi pemicu dalam meningkatkan

motivasi kinerja pegawai tersebut. Menurut Dharma(2004: 355), kinerja pegawai dapat diukur melalui:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran "tingkat kepuasan", yaitu seberapa baik tingkat penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.



Gambar 1. 1
Model Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Permasalahan yang diteliti ini akan menyoroti dua variabel. Variabel pertama adalah Sistem Informasi Berbasis Komputer (X) dan variabel kedua adalah kinerja pegawai (Y).

Dengan demikian dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh sistem informasi berbasis komputer terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan sistem informasi berbasis komputer terhadap kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

